

berhadiah untuk kepentingan umum, maka pemerintah perlu mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan undian untuk menepati janjinya. Penertiban itu dituangkan dalam bentuk perundang-undangan diantaranya adalah UU No. 38 tahun 1947 tentang undian uang negara, UU No. 22 - tahun 1958 tentang undian dan UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. (Masjful Zuhdi, 1991 : 137 - 138).

Syeh Abdurrahman Isa pun mengatakan bahwa Islam membolehkan usaha menghimpun dana guna membantu lembaga sosial keagamaan dengan memakai sistim undian berhadiah agar masyarakat terangsang untuk membantu usaha sosial itu.

Namun beliau mensyaratkan agar hasil undian berhadiah itu dipergunakan untuk :

1. Untuk kepentingan sosial keagamaan.
2. Penarikan undian harus disaksikan oleh petugas dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Sosial.
3. Dana yang masuk dibagi 60 % untuk dana sosial keagamaan sedangkan yang 40 % untuk biaya administrasi.

Alasan tidak memasukkan judi, karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama' Syafi'i adalah kedua belah pihak saling berhadapan dan masing-masing ada untung ruginya.

Akan tetepi kalau kita perhatikan secara obyektif-pelaksanaan lotre / undian / kupon berhadiah selama ini - seperti porkas, SDSB dan lain sebagainya dapatlah kita melihat dampaknya yang sangat berbahaya terhadap kehidupan-

mana masing-masingpeserta menyerahkan sejumlah uang atau-
sejumlah benda (bisa berupa manusia seperti istri atau a-
nak perempuannya di zaman dulu) sebagai taruhan baik lang-
sung atau tidak dengan maksud untuk mendapatkan kemenang-
an dengan mudah. (Panjimas No. 596, 1988 : 56 - 57).

Karena sifatnya yang demikian itulah maka Muhammad Yusuf-
Qurdlowi mengharamkan semua bentuk permainan yang didalam
nya ada unsur perjudiannya, sebab itu termasuk maisir yang
dalam Al Qur'an disebut bersama dan bersambung dengan arak
berhala, dan azlam (undian dengan anak panah untuk melaku-
kan atau tidak melakukan sesuatu yang telah menjadi kebia-
saan arab jahiliyah). (Ibrahim husain, 1986 : 9).

2. Dasar Hukum Undian

Sebagai mana kita ketahui bahwa haramnya maisir atau
tau judi seperti halnya haramnya khomer, ansab dan azlam.
Keharamannya itu didasarkan dalil qoth'i yang proses peng-
haramannya berangsur-angsur. Dalilnya adalah sebagai beri-
kut :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنفع
للناس واثمها اكبر من نفعها . البقرة ٢١٩

"Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi, kata-
kanlah : "pada keduanya terdapat dosa besar yang ber-
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar
dari manfaatnya". (Al Qur'an, 2 : 219).

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير
 الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
 وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على نصب وإن
 تمسقتموا بالأزلام المائدة ٣

"Diheramkan baginu (memakan) bangkai, darah, daging ba-
 bi atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul
 yang jatuh, yang di tanduk, dan yang dimakan binatang
 buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (di-
 haramkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan -
 (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah".
 (Al Qur'an, 5 : 3).

Kalimat Waan tastaqsimu bil azlam disini tidaklah menun-
 jukkan pengharaman undian tertentu, baik bentuk maupun mak-
 sud menyelenggarakannya, melainkan bersifat umum, karena -
 demikianlah umumnya masyarakat jahiliyahmelakukannya.

Maka dari ayat tersebut tidak hanya mengharamkan -
 undian yang diselenggarakan oleh masyarakat jahiliyah, akan
 tetapi juga mengharamkan segala macam undian uang diseleng-
 garakan untuk maksud dan dengan cara / alat lain yang de-
 wasa ini disebut alat yang serba canggih (azlam zaman mu-
 tahib).

Dari beberapa ayat itu dapatlah disimpulkan bahwa
 segala macam bentuk undian yang didalamnya terdapat un-
 sur - unsur perjudian adalah dilarang oleh agama, lain hal

nya dengan undian yang terdapat didalam surat Ali Imran yang berbunyi:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلَامَهُمْ لِيَكْفَلَ بِهِمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ «الْعَمْرَاءُ» ٤٤

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad) padahal kamu tidak hadir bersama mereka, ketika mereka melempar anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir disisi mereka ketika mereka bersengketanya". (Al Qur'an, 3; 44)

Juga terdapat sebuah hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه
فأيتهم خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل
امرأة منهن يوماً وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت
يوماً لعائشة رضى الله عنهما ، رواه أبو داود

"Dari Aisyah istrinya Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bila hendak bepergian beliau selalu mengundi istri-istrinya kemudaiian beliau berjalan dengan istri yang beruntung dalam undiannya, dan membagi untuk se tiap istrinya sehari dan semalam kecuali Saudah binti Zam'ah bagiannya diberikan kepada Aisyah r.a. ". (Sunan Abu Dawud, I; 493).

Dengan demikian maka undian yang semacam ini tidak dilarang oleh agama karena didalamnya tidak terdapat unsur - unsur perjudian disamping itu juga tidak ada yang dirugikan sebab undian yang semacam ini hanya merupakan sebuah bentuk permainan untuk menentukan siapa yang berhak untuk

memulainya, jadi undian yang semacam ini sama sekali tidak ada untung-untungan atau mengundi nasib. Hal ini dapatlah diqiaskan dengan undian yang ada ditabungan haji.

3. Macam-Macam Undian

Masalah undian ini dapatlah dibedakan menjadi dua macam diantaranya adalah:

a. Azlam.

Yang dimaksud dengan azlam adalah pelangkah atau undi pelangkah maksudnya adalah mengundi nasib. (Dr Fuad Mohd Fahrudin, 1985: 189).

Dizaman jahiliyah orang sering mengadakan undian dengan segala macam undi (lot) masing-masing undi itu ditulis dengan kata-kata, yang pertama tertulis: Tuhan suru aku, yang kedua Tuhan tidak suru aku, yang ketiga tidak tertulis apa-apa (kosong).

Bila mereka hendak berlayar atau mau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar mereka selalu mengadakan undian terlebih dahulu dengan cara menggoncang-goncangkan atau memutar lot-lot itu, bila yang keluar itu yang pertama mereka terus mengerjakan atau perjalanan diteruskan, tetapi bila yang keluar itu lot yang kedua maka segala pekerjaan tidak jadi dikerjakan, dan bila yang keluar itu yang ketiga maka mereka akan mengulangi lagi sampai berhasil. (Dr. Fuad Mohd Fahrudin, 1985; 189)

Bentuk undian semacam ini tidak ada yang dikalahkan dan yang dimenangkan yang ada hanyalah menentukan si apa yang memulai permainan terlebih dahulu, jadi masing-masing peserta tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada unsur untuk mengadu nasib, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Zakaria untuk memilih Mariam, karena pada waktu itu penghuni Baitul Maqdis berebutan ingin memelihara Maryam maka diadakanlah undian dan undian itu jatuh pada diri Nabi Zakaria maka dialah yang jadi pemeliharanya. (Syekh Ahmad Musthofa Al- Maraghi, *iii*, 1987 : 195).

Didalam Surat Ash- Shoffaatpun disebutkan bahwa Nabi Yunus pernah mengadakan undian karena kapal yang di tumpangi itu penuh dengan muatan dan kalau tidak dikurangi kemungkinan besar akan tenggelam, maka diadakanlah undian dengan ketentuan yang kalah akan dilemparkan ke laut, adapun yang kalah adalah Nabi Yunus maka dilemparkanlah dia yang akhirnya dimakan ikan yang besar. (Drs. H. M. Adib Bisri, 1985 : 309-310). Adapun ayat yang menceritakan kisahnya Nabi Yunus adalah :

وان يونس من المرسلين ، اذ ابق الى الفلك المشحون ، فسام
فكان من المدحضين ، فالتفته الحوت وهو مليم ، فلولا
انه كان من المسيبين ، للبت في بطنه الى يوم يعثون ،
فبذنه بالعرآء وهو سقيم ، وانبتنا عليه شجرة من يقطين

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul,
(ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh mu-

atan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal diperut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu". (Al Qur'an , 37 : 139 - 146).

Rasulullah SAW. sendiri jika hendak bepergian mu safir beliau selalu mengundi (qur'ah) diantara istri - istrinya yang ikut serta. Qur'ah disini sama dengan qur'ah yang ada ditabungan haji. (Umar Hubais, 1987 : 161). Jadi jelasnya bahwa undian tabungan haji yang ada di BPD JATIM Surabaya itu adalah untuk menentukan siapa yang berhak menerima pemberian itu, bukan termasuk untung-untungan atau mengundi nasib maka hukumnya diperbolehkan.

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

a. Asuransi menurut Hukum Positif

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kepailitan pasal 246 disebutkan bahwa pengertian asuransi atau dalam bahasa Belandanya " verzekring " adalah pertanggungan , yaitu suatu perjanjian antara kedua belah pihak, dimana seorang penanggung menerima suatu premi untuk memberikan pengertian kepada pihak tertang-

gung, karena suatu kerugian, kerusakan, dan kehilangan - keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita - oleh pihak tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tentu terjadi. (DR. Hamzah Ya'qub , 1984 : 292).

Pertanggung disini adalah merupakan suatu per - janjian dimana kedua belah pihak melakukan akad pertang - gungan, pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung mem - bayar sejumlah uang yang disebut premi untuk mengalihkan beban resikonya kepada pihak yang kedua yaitu pihak pe - nanggung.

Dengan demikian, maka pengertian asuransi itu ada lah suatu kemauan untuk menutupi kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substansi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dari rumusan itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa orang bersedia mem bayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bi sa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin akan terjadi pada waktu mendatang. (Drs. A. Abas Salim, 1989 : 1).

Menurut Djoko Prakoso, SH. Tujuan asuransi yang utama adalah mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan - oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti, yang tidak di harapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil re - siko itu, untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu se - lama tidak ada kerugian penanggung tidak akan mungkin

membayar ganti kerugian kepada tertanggung. (Djoko Prakoso, SH, 1987 : 262).

Dari pasal 246 diatas, pengertian pertanggungan dapat dilihat lebih lanjut yaitu mengenai unsur atau sifat-sifatnya bahwa penanggung pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian. Dalam hal ini penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan pengganti kerugian harus seimbang dengan kerugiannya yang sungguh-sungguh diderita. (Prinsip imdentit).

Prinsip tersebut dapat digariskan pada dua ketentuan pokok yaitu :

1. Bahwa tertanggung mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tentu terjadi sebagai akibat dari peristiwa itu menderita kerugian (pasal 250 jo 268 KUHD). Suatu ganti kerugian tidak seluruhnya harga obyek pertanggungan itu dipertanggungkan, sehingga masih ada resiko yang ditanggung oleh tertanggung sendiri.
2. Bahwa pertanggungan tidak boleh melebihi dari pemberian ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang diderita. (pasal 253 KUHD).

Pertanggungan disini merupakan perjanjian timbal balik artinya kewajiban penanggung memberi ganti rugi pada tertanggung dan sebaliknya tertanggung membayar pre

mi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

Dari sifat pertanggungan diatas, maka perjanjian pertanggungan itu disebut perjanjian konsensual artinya dapat diadakan sah hanya berdasarkan persesuaian kehendak antara kedua pihak, tanpa terikat oleh suatu bentuk.

Pada pasal 255 menyebutkan pertanggungan itu harus diadakan dengan suatu akte yang disebut polis, tetapi dalam pasal berikutnya yaitu pasal 257 dan 258 dapat disimpulkan bahwa polis itu hanya sebagai alat bukti, bukan suatu syarat yang mutlak untuk adanya suatu perjanjian pertanggungan, sehingga pasal 255 diartikan polis dibuat sebagai alat bukti dari perjanjian pertanggungan yang telah diadakan secara konsensual. (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 20).

b. Asuransi Menurut Hukum Islam

Didalam Islam tidak dijumpai dan dikenal macam dan bentuk asuransi, asuransi merupakan bentuk muamalah baru yang dikenal pada masa sekarang. Dalam prakteknya asuransi merupakan bentuk muamalah, karena didalamnya telah terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mengadakan perjanjian berdasarkan kesepakatan memenuhi hajat hidup dalam mencapai kesejahteraan.

Karena didalan kitab-kitab Fiqih Islam tidak dijumpai dan dibahas sewara pasti tentang pengertian asuransi, akan tetapi dalam fikih Islam istilah yang semacam dengan asuransi itu bermacam-macam mehurut bentuk - nya, diantaranya adalah :

1. Akad Mudhorobah (عقد المضاربة)

Perkataan itu berasal dari الضرب في الارض yaitu bepergian untuk urusan dagang, Firman Allah :

واخرون يضرعون في الارض يبتغون من فضل الله المزمل ٢٠
 "Dan yang lainnya berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah" (Al-Qur'an, 73 :20).

Menurut syara' bahwa mudhorobah itu adalah :

نوع من شركة العقد يتفق فيها على ان يكون رأس المال من جانب والعمل على استثماره من جانب آخر والربح مشترك بينهما

"Semacam syarikat akad yang bermanfaat antara dua orang padanya dengan ketentuan : Modal dari satu pihak sedangkan usahan menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi diantara mereka ". (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1974 :102).

Pengertian mudhorobah tersebut maksudnya adalah - kesepakatan diantara dua pihak mengadakan kerjasama dalam perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal sedangkan pihak lainnya menyerahkan labanya sebagai andil, keuntungan dan kerugian dibagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama. (DR.Ham

zah Ya'qub, 1984 : 264). Islam memberikan kelonggaran - dan kemudahan dalam usaha kerja sama untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan mengikuti garis lurus dan benar.

Mudhorobah dibenarkan dalam Islam, karena bentuk mudhorobah menghendaki kemudahan bagi manusia dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan, sebab mudhorobah mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Firman Allah :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، الْبَقَرَةُ : ١٨٥

" Allah menghendaki kelonggaran bagi kalian dan tidak menghendaki kalian dalam kesempitan " (Al-Qur'an , 2 : 185).

Misalnya saja bila seseorang memiliki kelebihan harta tapi tidak memiliki ketrampilan dalam memutarakan hartanya, maka harta yang banyak itu lambat laun akan berkurang dan akhirnya menjadi habis, begitu pula sebaliknya bila seseorang mempunyai ketrampilan berdagang - tetapi tidak mempunyai modal maka usahanya itu tidak akan bisa maju, akan tetapi bila masing-masing kelebihan itu digabung menjadi satu dan bekerja sama hal itu pasti akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, dengan demikian apabila bekerja sama dengan orang yang ahli dan terperwaja maka dapat membina dan mengembangkan suatu usaha yang keuntungannya dapat dinikmati bersama.

tidak dapat dijangkau bila dilaksanakan seorang diri.

Dalam hal ini asuransi dapat digolongkan dalam bentuk qaidah iltizam, sebab dalam prakteknya asuransi merupakan pertanggung jawaban antara kedua belah pihak dengan disertai adanya suatu perjanjian yang mana diantara keduanya mempunyai kewajiban, pihak yang tertanggung harus membayar premi kepada pihak yang menanggung, demikian pula pihak penanggung bertanggung jawab atas resiko yang diderita pihak tertanggung.

Begitupun dalam qaidah iltizam, adanya suatu keharusan untuk melaksanakan kewajiban untuk mengganti kerugian dari barang-barang milik orang lain yang dirasakannya yang menjadi sebab untuk kemaslahatan orang yang dirugikan.

2. Dasar Hukum Asuransi

Didalam menentukan dasar hukum asuransi, masih perlu dikaji lagi secara jelas sebab dasar hukum itu tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadits, para Ulama' Madzhabpun tidak pernah memberi fatwa hukum terhadap asuransi ini sebab asuransi itu termasuk bentuk muamalah baru. Para Ulama' Madzhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para Mujtahid lainnya yang semasa dengan mereka sewaktu menyusun Fiqih Madzhab itu sekitar abad VIII dan IX Masehi. Sedang

" Hendaklah kalian bertolong-menolong atas dasar ke-
baikan dan taqwa ; akan tetapi janganlah berto-
long-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran!"
(Al-Qur'an, 5 : 2).

Disamping itu pula Islam tidak menghendaki ada-
nya hidup dalam kesengsaraan, melainkan menghendaki hi-
dup bahagia didunia dan akherat, Hadits Nabi SAW. berbun-
nyai :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، رواه احمد

" Dari Ibnu Abbas ra. berkata, bersabda Rasulullah
SAW. Janganlah membuat kemudhorotan (kemelaratan)
jangan pula membalas kemudhorotan ". (As-Sayyid
Imam Muhammad Kahlani III, tt : 84)

Selain itu Allah juga akan memberi cobaan kepada
hambanya yang dikehendaki yang berupa berbagaimacam pe-
ristiwa yang belum diketahui terjadinya. Firman Allah:

ولنبلونكم بمتىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال
والانقص والثمرات وبشر الصابرين ، البقرة ١٥٥

" Dan sesungguhnya Akan Kami beri cobaan kepadamu de-
ngan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan har-
ta, jiwa, dan buah-buahan dan beritakanlah berita
gembira ini kepada orang-orang yang sabar ".
(Al-Qur'an, 2 : 155).

Dari ayat itu jelaslah bahwa sesungguhnya Allah
akan memberikan cobaan kepada hambanya dengan berbagai
peristiwa yang belum tentu diketahui kapan terjadinya ,
bahaya yang mengancam itu bisa terjadi pada dirinya -
yang berupa ketakutan jiwa,kehawatiran pada hartanya,ser

kan sistim asuransi itu baru dikenal didunia timur pada abad XIX Masehi, didunia barat dan sekitarnya pada abad XIV M. (Prof. DR. H. Masfuk Zuhdi, 1991 : 126). Hal ini bukan berarti bahwa dengan adanya lembaga asuransi itu dilarang oleh syara' , lembaga asuransi ini sudah termasuk kaidah pokok syari'at Islam. Kaidah itu berbunyi " Hukum Islam dalam kehidupan perdata manusia itu adalah boleh atau diperkenankan sehingga ditemukan dalil yang dilarang oleh nash yakni ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi ". (Hisbullah Bahry, 1988 : 308).

Pada hakekatnya asuransi itu merupakan suatu bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yangmana diantara keduanya itu saling menanggung dalam mengarungi beban kerugian yang mungkin terjadi pada harta dan jiwa manusia akan terancam bahaya, baik yang disebabkan karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan dan mungkin peristiwa itu akan diderita oleh sipenanggung, demikian ini sesuai dengan pasal 246 KUHD.

Maka dari itu kalau manusia berusaha untuk meringankan beban kerugian yang kemungkinan akan diderita yaitu dengan jalan usaha dan saling tolong menolong diantara sesama manusia baik dalam bentuk perkumpulan atau kerjasama adalah merupakan usaha yang dibolehkan dalam Islam. Firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

ta hasil pertaniannya. Selain itu Allah juga akan memberitahukan kepada hambanya supaya berhati-hati didalam hidupnya terhadap segala mabam yang dapat menjadikan dirinya rusak. Firman Allah :

وإنفقوا في سبيل الله ولا تعلقوا بآيديكم إلى التهلكة
 واحسنوا إن الله يحب المحسنين . البقرة ١٩٥

" Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah - dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinaasaan, dan berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ". (Al-Qur'an,2 : 195)

3. Bentuk-Bentuk Asuransi

Sejalan dengan perkembangan asuransi pada saat ini, dimana banyak sekali bermunculan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Timbulnya asuransi ini didasarkan atas kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin diresahkan oleh masyarakat, atas peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian diri dan harta kekayaannya , semakin banyaknya keresahan yang dialami masyarakat, maka muncullah berbagai macam bentuk asuransi.

Untuk mengetahui macam-macam bentuk asuransi itu dapat dilihat dalam pasal 247 di KUH Perniagaan, adapun macam bentuk asuransi itu adalah :

- a. Asuransi kebakaran.
- b. Asuransi bahaya hasil pertanian.
- c. Asuransi kematian orang (asuransi jiwa)

- d. Asuransi bahaya laut dan perbudakan.
- e. Asuransi bahaya didalam pengangkutan didarat dan di sungai. (Wirjono Projodikoro, 1987 : 18)

Ad. a) Asuransi kebakaran

Asuransi ini diatur dalam pasal 287 - 298 KUH-Perniagaan (Wetboek van Koophandel). Tujuannya adalah mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. (Wirjono Projodikoro, 1987 : 117).

Contoh : Si Ahmad mempertanggungkan rumahnya sebesar Rp. 5.000.000, rumah tersebut terbakar. Bila di adakan penilaian kerugiannya Rp. 1.500.000. (ter bakar sebagian saja) maka perusahaan asuransi hanya mengganti kerugian pada bagian yang rusak saja yaitu Rp. 1.500.000. Jadi tidak membayar - seluruh jumlah yang diasuransikan pada perusahaan tersebut. (A. Abbas Salim, 1989 :18).

Ad. b) Asuransi bahaya hasil pertanian

Didalam KUH Perniagaan (WvK) hanya memuat tiga pasal khusus terhadap bencana-bencana pertanian yaitu pasal 299, 300 dan 301.

Contoh : Perkebunan itu letaknya disungai yang airnya sering meluap sampai keluar dari arus sungai sampai banjir, resikonya, tanaman di perkebunan itu akan rusak lebih besar dari pada apabila

perkebunan itu letaknya jauh dari sungai.

(Wirjono Projodikoro , 1987 : 129)

Ad. c) Asuransi kematian orang (asuransi jiwa)

Asuransi jiwa adalah suatu alat sosial dan ekonomi, ia merupakan suatu cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama pemeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (premature death) dari anggota sekelompok itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan keuntungan (benefits) kepada ahli warisnya dari anggota yang meninggal. (Drs. A. Hasmi, 1981 : 81 - 82).

Sedangkan tujuan yang utama adalah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial. (Drs. A. Abbas Salim, 1989 ; 26).

Contoh : Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji jiwanya itu diasuransikan. Hal ini untuk menjaga bila sijamaah itu mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Jika ia mengalami musibah (kecelakaan atau meninggal dunia) maka yang mengganti kerugiannya itu adalah pihak yang mengelola ONH.

Ad. d) Asuransi bahaya laut dan perbudakan (pasal 592-634 KUHD)

Asuransi laut itu diadakan sehubungan dengan bahaya dari laut, dan untuk mengetahui adanya bahaya itu pada umumnya disaat kapal mulai berangkat berlayar, hal ini disebutkan dalam pasal 603 KUHD, dengan demikian maka asuransi laut itu dapat diadakan pada waktu kapalnya sudah mulai berlayar dengan ketentuan pada saat itu disebutkan dalam polis bahwa terjamin tidak tahu hal itu, disamping itu khabar terakhir dari kapal itu harus disebutkan juga,

Sedangkan mengenai bahaya perbudakannya disebutkan dalam pasal 618 KUHD. Yaitu pertanggungan terhadap perbudakan harus dilakukan untuk suatu jumlah uang dengan orang-orang yang diperbudakkan, yang kebebasannya dipertanggungkan itu, dapat dibeli kembali.

Ad. e) Asuransi bahaya didalam pengangkutan didarat dan disungai

Asuransi ini khusus diatur dalam pasal 686 -695 W v K. Didalam pasal 687 disebutkan bahwa asuransi pengangkutan didarat dan disungai pada umumnya takluk pada peraturan yang diadakan untuk asuransi laut, kecuali jika ada peraturan khusus dalam pasal-pasal yang berikutnya. (Wirjono Projodikoro, 1987 : 145)

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Dalam Islam

a. Adanya Akad

Asuransi merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian perlu adanya akad yang menunjukkan kata sepakat yang dikenal dengan ijab qabul, seperti dalam jual beli bahwa berlakunya jual beli itu diwajibkan adanya akad antara penjual dan pembeli yang menunjukkan persetujuan antara keduanya.

Islam tidak membatasi bentuk-bentuk tertentu tentang bagaimana model akad yang harus dipegangi. Dalam kaidah fiqhiyah berbunyi :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

" Yang dipegangi dalam soal akad adalah maksud dan makna, bukan pada lafad dan perkataan ".
(Hasbi Ash-Shiddiqy II, 1981 : 106).

Kata sepakat dalam Islam dikenal dengan ijab dan qabul karena ijab qabul itulah melahirkan kata sepakat baik dalam bentuk perbuatan, lesan maupun bentuk yang lain. Bentuk teks bagi orang yang melakukan transaksi jarak jauh, sedangkan bagi orang yang bisu ijab qabulnya dalam bentuk isyarat.

Dengan demikian berdasarkan kaidah pokok dalam muamalah asal setiap akad itu boleh apabila merealisasikan dengan kerelaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak selama tidak ada dalil yang melatangnya.

ان الاصل في العقود الاباحة كانت يرضا المتعاقدين الاما دل دليل علم منه

li berhak memilih dan setelah dikembalikan maka pembeli berkewajiban membayar sesuai yang ditetapkan antara keduanya, begitupun sebaliknya penjual berhak menerima uang dari pembeli dan penjual berkewajiban tidak melakukan tipu daya terhadap barang yang diperjual belikan.

Maka Islam memberi aturan bahwa dalam usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih adanya hak dan kewajiban. Firman Allah :

ثم نجى رسلكم والذين آمنوا كذلك حق علينا نجى المؤمنين «يونس» ١٠٣

"Kemudian Kami selamatkan Rasul-Rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman". (Al-Qur'an, 10 : 103).

Dengan adanya hak maka timbullah kewajiban yang bermacam-macam menurut bentuk usahanya. Salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk membayar upah bagi orang tua yang menetekkan anaknya pada wanita lain. Firman Allah :

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا اسلمتم ما اتيتم بالعرف ، البقرة ٢٣٣

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". (Al-Qur'an, 2: 233)

C. Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Apabila kita melihat fungsi bank maka akan mendapatkan perlakuan dari bank memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh dari bank itu ada yang menamakan bukan termasuk bunga bank tetapi merupakan jasa bank.

Demikian pula tindakan bank terhadap simpanan giro, tabungan hari dan lain sebagainya, pihak bank hanya memperoleh ongkos ketatausahaan, walaupun ongkos itu digabungkan kepada besar kecilnya simpanan, hal ini berkaitan dengan pertanggungan jawab atau resiko yang harus dipikulnya.

Adapun jasa bank yang mendapat upah administrasi (administration fee) yang tidak termasuk pengertian bunga ada dua macam yaitu jasa dalam negeri dan jasa luar negeri, tetapi keduanya tidak berkaitan dengan modal, bank semata-mata hanya membantu pihak ketiga, bantuan inilah yang shirnya bank menerima upah.

Dr. Moh. Hatta membedakan bunga atas penggunaan modal, kalau bunga itu diperoleh dari penggunaan kapital untuk usaha produktif disebut "rente" sedangkan kalau bunga itu diperoleh dari penggunaan usaha konsumtif dinamakan "riba" (Dr. Muhammad Hatta, II, 1958:33).

Pendapat ini atas pertimbangan dua sebab yaitu pertimbangan dari segi psikologi dan ekonomi. Pertimbangan dari segi psikologi adalah bahwa kemauan dari kedua orang untuk membayar rente umumnya karena setiap orang

itu menghargai barang sekarang dari pada barang kemudian, penghargaan seratus rupiah sekarang lebih besar daripada seratus rupiah untuk masa kemudian. Semakin sukar penghidupan seseorang semakin besar kemudahan barang yang dibutuhkan sekarang. Juga semakin jauh waktu tersedianya barang tersebut semakin besar pula penghargaan terhadap barang yang telah tersedia sekarang, Maka dengan penghargaan itulah seseorang mau mendapatkan yang lebih kecil jumlahnya dan mengembalikan jumlah yang lebih besar dimasa mendatang. (Dr. Fuad Mohd Fachruddin, 1985:28-29).

Keadaan semacam inilah yang diketahui oleh para rentener, para rentener menggunakan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, sehingga bunga yang ditariknya bisa saja tidak terbatas jumlahnya, inilah yang bisa menjadi riba karena sifatnya yang berlipat ganda dan pemakaiannya semata-mata karena desakan konsumtif dari pemijamnya.

Berbeda dengan pertimbangan ekonomi, tingginya suku bunga itu terbatas, sebab orang yang mau meminjam ini pasti dengan pertimbangan ekonomis, dengan uang pinjamannya itu ia dapat mendirikan perusahaan atau memperbesar perusahaannya yang tentu saja dengan pertimbangan bahwa ia tidak akan meminjam apabila diperkirakan antara keuntungan yang dirahi sama atau lebih kecil dari bunga yang harus dibayar, tetapi ia mau meminjam dan membayar bungahnya apabila dalam perhitungan bahwa keuntungan yang akan diperoleh lebih tinggi dari pada bunga yang ha-

rus dibayar kepada bank, disinilah letak rente dalam bank sebab sifatnya yang produktif.

2. Dasar hukum bunga bank

Banyak hal yang saling berkaitan dalam membenahi perekonomian, khususnya dalam perbankan "suku bunga" dan suku bunga itu merupakan penghasilan terbesar dari bank, sedangkan suku bunga itu sendiri masih diperselisihkan - kebolehannya dalam hukum islam.

Semasa Rasulullah SAW masih di kota Makah dan masih bercampur dengan orang musyrikin, Allah telah memberikan isyarat tentang haramnya riba, sebagaimana telah di riwayatkan oleh Ibnu Kastir, pada waktu itu seseorang memberi pemberian kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan yang lebih banyak dari pemberiannya. (Jalilul Hafid Imadduddin Abil Falak Isma'il Ibnu Katsir Al Ouraisyi III :434). Yang demikian itu tidak mendapat pahala di sisi Allah, firman Allah:

وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تزيدون وجه الله فاولئك هم المضعفون " الروم ٣٩

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Al Qur'an,30:39).

yang dilarang dan yang tidak berlipat ganda tidak dilarang sebab nas yang melarang riba itu tidak hanya ayat itu saja, masih banyak nas yang lain sebagaimana disebutkan di atas.

Berkenaan dengan ini Abu 'A'la Al Maududi berkata "Tiap-tiap tambahan atas modal sedikit atau banyak, yang diperhitungkan dengan masa dan disyaratkan waktu akad adalah riba yang tidak diragukan lagi". (Abu A'la Al Maududi, 1981:44).

Hal itu berkenaan dengan hadist yang berbunyi:

حدثني اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسئة

"hadist dari Usama Bin Zaid sesungguhnya Rasulullah - SAW bersabda: Ketahuilah bahwa sesungguhnya riba itu adalah nasiah". (Imam Muslim I:697).

Rasulullah SAW sendiri juga pernah melaknat pemakan riba pembantunya, penulisnya juga saksinya. Hadist itu berbunyi:

عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله قال : قلت وكاتبه وشاهديه « رواه مسلم

"Dari Al Qomah dari Abdillah telah berkata, Rasulullah (mengutuk) pemakan riba dan yang pembantunya, berkata Abdillah juga saya katakan penulis dan saksinya". (Imam Muslim, I:697).

Juga hadist lain yang berbunyi:

عن عمر بن خطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وحاء والبر بالبر

ربا الاهاء وهاء والشر بالشر ربا الاهاء وهاء والشعير
بالشعير ربا الاهاء وهاء ، رواه البخاري

"Dari Umar Ibnu Khottob r.a. mengabarkan dari Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW (jual beli) - mas dengan mas itu riba kecuali kontan, kurma dengan kurma itu riba kecuali konyan, juwawud dengan juwawud itu riba kecuali kontan". (Shoheh Bukhori, III:89).

Dilihat dari jenis barang tersebut maka ulama dho hiriah mengatakan "jenis-jenis barang tersebut tidak ada illatnya". (Abil Wahib Abdul Wahab Ibnu Ahmad Ibnu Ali Al Anshori, II:68).

Berarti hanya beberapa jenis barang saja yang di katagorikan barang yang tidak boleh menukarkan dengan adanya kelebihan salah satunya yaitu terbatas pada emas, perak, gandum, juwawud, kurma, dan garam.

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa illat dari jenis barang tersebut adalah "barang yang dapat ditimbang dan ditakar" Imam Malik mengatakan bahwa illat - barang tersebut adalah jenis barang yang menguatkan, Imam Syafi'i membagi dua bagian, mas dan perak illatnya adala "harga". Sedangkan jenis yang lain menurut kaul Qadimnya adalah makanan yang dapat ditakar dan ditimbang, sedang kan kaul jadidnya adalah barang yang dapat dimakan.

Selain dari apa yang tersebut di atas ada juga yang mengatakan bahwa Nabi pernah meminjam dan sewaktu mengembalikannya beliau melebihi pembayaran dari jumlah yang dipinjamkannya. Prilaku yang demikian itu sangat ter-

puji asal hal itu dilakukan dengan suka rela, pernyataan itu sesuai dengan hadist yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزدني . رواه البخاري

"Dari Jaber bin Abdillah r.a. beliau berkata: Saya telah datang kepada Nabi, sedangkan beliau berhutang kepadaku, beliau membayar hutang kepadaku dan menambahnya". (Shahih Bukhari, III:153).

Hadist yang lain berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغظاه فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فاعطوه اياه وقالوا لا نجد الا افضل من سنة قال اشتروه فاعطوه اياه فأت خيركم احسنكم قضاء . رواه البخاري

"Dari Abu Hurairah r.a. memberitahukan bahwasannya se orang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dengan bermaksud akan mengasih hutang, dan ia berlaku kasar, para sahabat bermaksud hendak menyakiti orang itu namun Nabi bersabda: "Biarlah, sesungguhnya orang yang berhak itu merdeka (bebas berbuat)". Seterusnya beliau bersabda: "berikanlah unta yang semisal dengan untanya (yang dipinjam)". Kata mereka: "Ya Rasulullah kami tidak mendapatkan unta yang semisal dengan untanya melainkan yang lebih baik dari pada untanya". - Sabda Rasulullah: "Berikanlah kepadanya sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik pembayaran (hutangnya)". (Shahih Bukhari, III: 153)

3. Beberapa pendapat Ulama tentang suku bunga bank

Di kalangan para Ulama dan sarjana muslim hingga-kini masih belum memperoleh kesepatannya mengenai hukum nya bunga bank. Di antara mereka ada yang melarang tetapi ada pula yang memperbolehkan, lain dari itu ada pula yang menghendaki dan menyarankan supaya diadakan permusyawaratan terlebih dahulu antara para ahli untuk menetapkan boleh tidaknya memungut bunga bank sebab orang masih banyak yang ragu-ragu apakah bunga bank (rente) itu sama dengan riba.

a. Pendapat yang mengharamkan bunga bank

Syeh Muhammad Abu Zara, Abul A'la Al Maududi, Dr. Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa suku bank itu termasuk riba yang dilarang oleh hukum islam. Pendapat ini berdasarkan firman Allah firman Allah:

فان لم تقفوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تضلمون ولا تضلمون ، البقرة ٢٧٩

"Maka jika kamu tidak mengerjekan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al Qur'an, 2:279).

Ayat ini memberi pengertian tentang riba yaitu sesuatu yang berlebihan dari modal, demikianlah suku bunga yang boleh dikatakan relatif kecil, tetapi itu merupakan tambahan maka disebut riba, ayat ini sejalan dengan

menjadi bukti atas hal yang demikian, selanjutnya beliau (KH Mas Mansur) mengatakan bahwa "Alhamdulillah Allah telah memberi jalan kepada kita bila keadaan sudah memaksa. (Dr. Hamzah Ya'qub, 1984:198).

Dengan demikian maka hukum suku bunga dalam bank-adalah haram, tetapi diperkenankan, dipermudah, dan di perbolehkan mengerjakannya selama keadaan memaksa, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

ان مع العسر يسرا . الم شرح ٦

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan". - (Al Qur'an, 94:6).

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . البقرة ١٨٥

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (Al Qur'an, 2:185).

وما جعل عليكم في الدين من حرج . الحج ٧٨

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (Al Qur'an, 22:78).

Sedangkan goidah fiqh menyatakan bahwa:

اذا تعارض مفسدان روي اعظمها ضررا جاز بكاب اخفها

"Apabila terdapat dua kemafsadatan bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madlorotnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madlorotnya". (Imam-Jalaluddin Abdurahman Ibnu Abu Bakar As-Syuyuti ASy Syafi'i:62).

Demikianlah di antara yang membolehkan bunga bank dengan keadaan dlorurat dan karena sifatnya yang dlorurot itu tidak boleh berlebihan di dalam pemakaiannya, yaitu sekedar batas apa yang dibolehkan karena adanya kemadlorotan .

ما بيع للضرورة بقدر تقديرها

"Apa yang diperbolehkan karena adanya kemadlorotan diukur menurut kadar kamadlorotannya". (Imam Jalaluddin Abdurahman Ibnu Abi Bakar as Syuyutu asy Syafi'i:60).

Sehingga kebolehanannya itu hanya sekedar untuk menghilangkan kemadlorotan yang sedang menimpah, maka apabila suatu kemadlorotan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehanannya berdasarkan atas kemadlorotan itu menjadi hilang pula artinya perbuatan itu kembali ke asal mulanya, yaitu tetap terlarang.

c. Pendapat yang menghalalkan bunga bank

Seperti yang telah disinggung terdahulu bahwa - Dr. Mohammad Hatta membedakan anantara riba dan rente.

Kalau bunga yang diperoleh itu dari penggunaan kapital untuk usaha produktif disebut "rente". Sedangkan bunga yang diperoleh dari penggunaan kapital untuk usaha konsumtif disebut "riba" (Dr. Mohammad Hatta II, 1958:25).

Di sini yang termasuk dilarang adalah bunga dari penggunaan kapital untuk usaha konsumtif, sebab itulah yang disebut riba, sedangkan bunga dari penggunaan kapital untuk usaha produktif disebut rente dan tidak di

larang oleh hukum islam.

Alasan rente tidak dilarang itu adalah karena sifatnya yang tidak berlipat ganda, dan seseorang mau menggunakan kredit yang diperoleh dari bank dengan membayarnya bunga semata-mata karena pertimbangan ekonomis, sedangkan riba itu tipudaya dan aniaya. (Dr. Mohammad Hatta II, 1958:29).

Dengan demikian maka bank itu tidak ada tujuan untuk menipu dan menganiaya, bahkan bank menolong orang yang membutuhkan, itulah sebabnya beliau mengutip pendapatnya H. Abdullah Ahmed (Padang) yang membolehkan memungut rente apabila rentenya itu disebutkan dan diumumkan terlebih dahulu (Dr. Fuad Muhad Fahrudin, 1985:18). Sehingga calon peminjam telah mengetahui seberapa besar dia harus memperoleh keuntungan dengan menggunakan kapital yang akan dipinjamnya nanti.

Pikiran ini sejalan dengan pendapatnya A. Hasan dari persetujuan islam yang mengemukakan bahwa ayat Al Qur'an dan hadist yang mengharuskan riba tidak ada yang menerangkan batasannya, melainkan ayat 130 surat Ali Imran yaitu melarang riba yang berlipat ganda.

Dalam ayat 130 surat Ali Imran ini menunjukkan muqoyyad, sedangkan ayat yang lain menunjukkan sudah mutlak. Menurut qaidah ushul fiqh bahwa di dalam suatu urusan kalau ada dua keterangan, satu mutlak dan satu muqoyyad ma

